

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

**Haris Samarga
NPM. 1421020176**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Siyasah Syar'iyah**

Oleh :

**Haris Samarga
NPM. 1421020176**

Jurusan : : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H
Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Dalam membicarakan hukum Islam, di tengah-tengah hukum Nasional, pusat perhatian akan menuju pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia, berkembang secara beragam karena sejarah sistem hukum di Republik ini memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, setidaknya tiga sumber hukum seperti hukum Barat, Adat dan juga hukum Islam memberikan sumbangsih pada tata hukum Indonesia. Pada sumber hukum Islam yang menjadi inspirasi dan sumber pembentukan hukum positif kerap kali dipertentangkan dengan hukum nasional. Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia? Serta bagaimanakah kontribusi hukum Islam terhadap pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sejarah, dinamika, dan hukum Islam apa saja yang telah diadopsi dalam produk hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*Library Reasearch*), yaitu suatu proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandaraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sumber pustaka agar menggambarkan secara objektif materi yang diteliti. Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana kontribusi dan kedudukan hukum Islam di Indonesia

Kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah bahwa Hukum Islam memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum di Indonesia, hal ini terkait erat dengan sejarah kedatangan Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 masehi. Setelah masuknya Islam ke Indonesia, agama Islam secara cepat dianut oleh masyarakat Nusantara hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Perkembangan hukum positif di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam melalui jalur legislasi maupun non legislasi menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki kontribusi dan prospek yang baik. Dengan demikian, hukum Islam dengan kedudukannya yang strategis serta kontribusinya yang besar dalam sistem hukum di Indonesia memiliki banyak peluang untuk masuk dalam perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia. Saat ini telah nampak adanya fenomena perkembangan yang positif dalam penerimaan masyarakat, elit penguasa, dan legislatif terhadap kehendak legislasi hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kedudukan Hukum Islam, Kontribusi Hukum Islam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Ban. " Lampung 35131. Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haris Samarga
NPM : 1421020176
Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 16 Maret 202

Penyusun,



Haris Samarga
NPM. 1421020176



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suramin, Sukarama, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di
Indonesia**
Nama : Haris Samarga
NPM : 1421020176
Jurusan : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syaria'h

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H
NIP. 195512251985031002

Drs. Henry Nwansyah, M.A
NIP. 195812071987031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah**

Frenki M. Si
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Surulimin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia"**, disusun oleh **Haris Samarga, NPM:**

1421020176, Jurusan : Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H

Sekretaris : Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I.

Penguji I : Dr. Jayusman, M. Ag.

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal S.H., M.H.

Penguji III : Drs. Henry Iwansyah M.A.



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q. S An-Nisa [5] : 59)



PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Rabb ku, Allah SWT, Tuhan semesta alam.yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah yang tak terhingga pada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati, dan para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia pada peradaban yang egaliter. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu, terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tulus, serta senantiasa mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah, dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Kakaku yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan, keceriaan dan semangat baru untukku.
3. Kepada yang terisitmewa, Fika Rantika terimakasih telah menemani dan memberikan semangat hingga skripsi ini terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Haris Samarga, lahir di Padang Ratu 17 Juli 1996. Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh ialah sebagai berikut :

1. SDN 3 Negeri Sakti Sungkai Utara Tahun 2008;
2. SMPN 2 Baruraharja Sungkai Utara Tahun 2011;
3. SMAN 1 Ketapang Sungkai Utara Tahun 2014
4. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia”**. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam disampaikan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dukungan, dan provokasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. sDekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengayomi penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H Pembimbing Akademik satu, yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.
5. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku pembimbing dua yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan banyak ilmu bagi penulis selama di perkuliahan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 16 Maret 2021

Haris Samarga
NPM. 1421020176



DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Sistem Hukum di Indonesia	18
1. Hukum Adat	20
2. Hukum Barat	26
B. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia	30
C. Pembinaan Sistem Hukum di Indonesia.....	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	41
A. Sejarah dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia	41
1. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pra-kolonial	42
2. Kebijakan Hindia-Belanda Terhadap Hukum Islam	44
3. Perkembangan Hukum Islam Pasca Kemerdekaan	48
B. Legalisasi Hukum Islam dalam Perundang-Undangan di Indonesia	54
C. Hukum Islam dan Pembinaan Sistem Hukum di Indonesia.....	61

D. Beberapa Contoh Penerapan Hukum Islam di Indonesia	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	70
A. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia	70
B. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembentukan Undang-Undang di Indonesia	81
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi.....	90
DAFTAR RUJUKAN	92
LAMPIRAN	98



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang diinginkan peneliti dan menghindari penafsiran yang keliru, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung pada judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”. Adapun beberapa istilah yang mesti peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan memiliki arti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.¹
2. Hukum Islam, merupakan sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah Swt. yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri dari atas hukum-hukum tentang ibadah-ritual, aturan-aturan politik, pidana, perdata ataupun aturan-aturan hukum pada umumnya.²
3. Sistem Hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat demi mencapai suatu tujuan.³

¹ Tersedia On-Line <https://www.kamusbesar.com/kedudukan> Diakses Pada Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB.

² Ahmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

³ Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 21.

4. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang dua pertiga dari wilayahnya berupa lautan dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.⁴

Dengan beberapa penegasan judul di atas, penulis akan membahas kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Penulis memfokuskan diri pada sumbangsih dan kontribusi hukum Islam dalam perkembangan hukum di Indonesia. Selanjutnya, kontribusi hukum Islam dilihat bagaimana status atau posisinya dalam sistem hukum yang berlaku di Indoneisa.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum Indonesia (Nasional) tumbuh dan berkembang dari berbagai sistem hukum (legal sistem) yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem hukum yang berlaku dan dapat diterima secara luas dapat bertahan, sedangkan sistem hukum yang pengaruhnya kurang menyebabkan eksistensi sistem hukum tersebut dipertanyakan. Dalam membicarakan Hukum Islam, di tengah-tengah hukum Nasional, pusat perhatian akan menuju pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Sistem hukum Indonesia, berkembang secara beragam karena sejarah sistem hukum di Republik ini memiliki sumber hukum yang majemuk. Disebut demikian karena di

⁴Amiek Soemarmi dkk, "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019.

Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri memberikan sumbangsih pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum itu adalah sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat. Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-tujuh masehi, tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam peradilan agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penguhi seperti di Jawa. Mahkamah *syar'iyah* di kesultanan Islam di Sumatra. Peradilan *qadi* di kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa kesultanan telah berdiri secara formal peradilan agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasihat dan hakim, belum pernah di susun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang di terapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqh. Baru pada tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. *Compendium* ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC.⁵

Penggunaan *Compendium Freijer* tidak berlangsung lama. Pada tahun 1800 VOC menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu lenyap dan tenggelam *Compendium* itu. Lahirnya

⁵Supomo Dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, (Jakarta: Djambatan 1955), 6.

politik hukum baru, yang didasarkan atas teori *receptive* atau teori konflik Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Sejak itu secara sistematis, dengan sengaja hukum Islam dikesampingkan. Sebagai gantinya digunakan atau ditampilkan Hukum Adat.

Pemerintah Hindia Belanda mencoba melaksanakan hanya dua sistem hukum yang berlaku, yaitu Hukum Adat untuk golongan Bumiputera dan Hukum Barat bagi golongan Eropa. Upaya paksaan untuk melenyapkan peran Hukum Islam, terakhir diterapkan dalam *Staatblad* 1937 Nomor 116. Aturan ini merupakan hasil usaha komisi Ter Haar, yang di dalamnya memuat rekomendasi: (1) hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. (2) mencabut wewenang Peradilan Agama (*Raad Agama*) untuk mengadili perkara kewarisan, dan wewenang ini dialihkan Kepada *Landraad*. (3) Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan *Landraad*. (4) putusan pengadilan agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *Executoir Verklaring* dari ketua *Landraad*.⁶

Konstitusi kita sebelum amandemen, tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah Hukum Adat dan Hukum Islam. Namun bila ditelaah, maka dapat kita jumpai bahwa Hukum Islam sesungguhnya menjadi jiwa dari rumusan-rumusan dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat pandangan hidup Pancasila. Hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola fikir dan di dalam Hukum Islam. Mari kita lihat dalam Pasal 29 ayat (1) Negara

⁶M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: "Abstraksi Hukum Islam"*, (Jakarta: Logos, 1999), 27.

berdasarkan ketuhanan yang maha esa, pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.⁷

Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptive* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Teori *receptive* harus keluar karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸

Hazairin menyebut teori *receptive* sebagai teori Iblis. Berdasarkan pendapatnya ini, Hazairin mengembangkan teori yang disebutnya sebagai teori *receptive exit*.⁹ Pokok-pokok pikiran Hazairin tersebut membuat teori *receptive* patah, tidak berlaku dan keluar dari tata Negara Indonesia. Sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya undang-undang dasar 1945, sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk Hukum Nasional Indonesia. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk melaksanakan hal tersebut. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain.

Hukum agama di bidang hukum perdata diserap, dan hukum pidana diserap menjadi Hukum Nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia

⁷Faisal, *Pluralisme Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta:Maghza, 2013), 51.

⁸Ichtijanto, "*pengembangan teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia*" (Bandung: Rosdakarya, 1991), 128.

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

dengan dasar Pancasila. Disamping Hazairin, seorang tokoh yang juga menentang teori *receptive* adalah Sayuti Thalib yang menulis buku *receptie a Contrario*: hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini jiwa pembukaan dan undang-undang dasar 1945 telah mengalahkan pasal 134 ayat 2 *Indische staatsregling*.¹⁰

Menurut Ismail Sunny setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai dasar negara kendati tanpa memuat ke-tujuh kata dari Piagam Jakarta maka teori *receptive* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Era ini disebut Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*).¹¹

Selanjutnya dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 juli 1959, maka era ini dapat dikatakan era penerimaan Hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*Authoritative Source*). Sehingga seringkali disebut bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Kata menjiwai bisa bermakna negatif dalam arti tidak boleh dibuat perundang-undangan dalam Negara Republik Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara positif maknanya

¹⁰Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario*, (Jakarta:Bina Aksara, 1985), 37.

¹¹ Ismail Sunny, "*tradisi dan Inovasi keIslaman di Indonesia dalam bidang Hukum Islam*" (Jakarta: Logos Publishing, 1988), 96.

adalah pemeluk-pemeluk yang beragama Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Secara historis lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sarat dengan dinamika politik. Dengan mengandalkan dukungan dari fraksi karya pembangunan yang merupakan mayoritas dan fraksi ABRI yang diharapkan menjadi stabilisator. Sehingga pada tanggal 13 juli 1993 pemerintah menyampaikan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan harapan untuk mendapatkan prioritas utama pembahasan dan bersamaan dengan itu dua RUU yang pernah disampaikan oleh pemerinyah kepada DPR-GR di cabut kembali. Dua RUU yang dicabut kembali itu adalah rancangan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan dan rancangan undang-undang tentang perkawinan umat Islam.¹²

Pada perkembangan selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam merumuskan aturan tentang wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (pasal 215 ayat 1). Lahir pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pengolaan Zakat yang disahkan di jakarta pada tanggal 23 september 1999

¹²Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002), 257.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti kedudukan Hukum Islam pada sistem hukum di Indonesia, yang belum sepenuhnya diterapkan di Negara Republik Indonesia. Sebab hukum yang berlaku di Indonesia adalah Perundang-Undangan bukan hukum Islam, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, namun pemerintah pun mengecualikan provinsi yang memang ingin menerapkan Hukum Islam seperti di Aceh. Meskipun, hukum Islam tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia, pemerintah pun setiap membuat peraturan tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian terhadap “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlampau melebar maka perlu diidentifikasi masalah yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Masalah yang akan penulis teliti adalah kedudukan Hukum Islam dan kontribusinya dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Sehingga penulis membatasi diri untuk meneliti sumbangsih Hukum Islam dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah kontribusi hukum Islam terhadap pembentukan Undang-Undang di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan kedudukan hukum Islam pada sistem hukum di Indonesia dengan kerangka sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi hukum Islam dalam pembentukan Undang-Undang yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Siyasah Syar'iyah pada aspek pembentukan Undang-Undang di Indonesia terutama yang digali dari nilai-nilai ke-Islaman.
2. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan yang menambah khazanah ilmu hukum, terutama dalam penggalian

hukum yang bersumber dari hukum Islam. Selain itu, penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian penulis telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa kesamaan serta perbedaan dari penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Kajian penelitian yang relevan terdahulu disajikan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil kajian sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji orang lain. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan:

1. Jurnal yang ditulis oleh Mardani dengan tajuk “Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum sistem hukum nasional”. Mardani mencoba melihat kedudukan hukum Islam dalam sejarah perkembangan sistem hukum Nasional tetapi juga dipengaruhi oleh sumber hukum adat dan eropa kontinental. Dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Masih banyak peluang hukum Islam masuk dalam perundang-undangan di Indonesia. Saat ini telah nampak adanya fenomena perkembangan yang positif dalam penerimaan masyarakat, elit penguasa, dan legislatif terhadap kehendak legislasi

hukum Islam. Jurnal yang ditulis Mardani ini memfokuskan diri pada sejarah perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional.¹³

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aiz dengan judul “Format hukum Islam di Indonesia”. Dalam jurnalnya, Muhammad Aiz mendukung pendapat Ibn al-Muqaffa (756 M) yang menyatakan perlu adanya unifikasi peraturan yang berlaku bagi semua warga negara, termasuk peraturan yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Selain itu juga Muhammad Abduh (1849-1905) menyatakan bahwa ajaran Islam yang diterapkan ulama terdahulu tidak berlaku abadi, dan menjadi kewajiban di masa kontemporer saat ini untuk memformulasikan hukum sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungan. Artikel ini menentang pendapat Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-1792 M) yang mengartikan hukum hanya berdasarkan literatur (tekstual) tanpa memberi tempat pada pemahaman hukum secara majazi dan qiyasi. Selain itu, Taqiyyuddin al-Nabhani (1909-1977) yang menyatakan perlunya mendirikan Khilafah guna ditegakannya syariat Islam di seluruh negeri. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian Muhammad Aiz penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum¹⁴.
3. Jurnal yang ditulis oleh Mahdi Syahbandir dengan judul “Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum”. Penelitian ini mengenai sejarah hukum adat di Indonesia dan terutama yang diteliti oleh Snouck

¹³ Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Sistem Hukum Nasional” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 2, 2008.

¹⁴ Muhammad Aiz, “Format Hukum Islam Di Indonesia” *Jurnal Kordinat* Vol. XVII No.1, 2018

Hurgronje pada tahun 1983. Dalam perjalanannya hukum adat diakui pada masa kolonial Belanda yang merupakan hukum bagi masyarakat pribumi pada masa itu. Dalam penelitiannya ini, Mahdi mencoba menelaah peranan hukum adat dalam perkembangan hukum di Indonesia sejak masa penjajahan hingga reformasi.¹⁵

4. Jurnal yang ditulis oleh Sopyan Mei Utama dengan judul “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Dalam penelitiannya Sopyan menjelaskan bahwa mayoritas penduduk yang beragama Islam di Indonesia membawa nuansa keislaman dalam pembentukan suatu peraturan. Berkaitan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional Indonesia yang sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Sebab, Perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah airnya dan catatan sejarah hukum Islam yang sudah membumi di bumi nusantara ini semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, karenanya eksistensi hukum Islam keberlakuannya tergantung pada umatnya untuk menegakannya.¹⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai persoalan mengenai kedudukan hukum Islam di Indonesia. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan oleh setiap peneliti. Para peneliti di atas

¹⁵ Mahdi Syahbandir, “kedudukan hukum adat dalam sistem hukum” *Jurnal Kanun* No. 50, 2010.

¹⁶ Sopyan Mei Utama, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 2018.

menggunakan hukum adat sebagai pijakan, adapula yang melihat kedudukan hukum Islam dalam aspek kesejarahannya. Kesamaan yang cukup dekat dengan penelitian penulis adalah jurnal yang ditulis oleh Mardani. Ia mencoba melihat kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional dengan membandingkannya dengan hukum adat dan hukum eropa kontinental.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan artian, menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (primer)¹⁷.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sumber pustaka agar menggambarkan secara objektif materi yang diteliti.¹⁸ Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana kontribusi dan kedudukan hukum Islam di Indonesia.

¹⁷ Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989), 2.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder, Data primer adalah “Data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian, dan sumbernya adalah data primer”²⁰. Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data-data primer. Data sekunder ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti seperti buku-buku, dokumen, dan majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai data yang diperoleh.²¹ Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang berdasar dari kepustakaan, buku-buku, maupun literatur yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini.
- b. Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia Islam, katalog, bibliografi dan lain-lain.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: UGM Perss, 1989), 136.

²¹ Amiruddin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 32.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²²

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Editing*

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara menggunakan kuesioner, studi pustaka, dokumentasi, sudah dianggap lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan²³. Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik buku-buku berisi materi pokok dan dokumentasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

2) *Coding*

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata

²² Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I*, (Jakarta : UI Press, 1993), 37.

²³ Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 125-126.

tertentu yang menunjukan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3) *Sistematising*

Yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberitanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Langkah ini digunakan penulis agar memudahkan dalam menganalisis data.²⁴

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan. Dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini, dengan kalimat kunci yakni, “kerap kali terjadi benturan antara sistem Hukum Nasional dengan Hukum

²⁴Muhammad AbdulKadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 90-91.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 42.

Islam”. Padahal dalam sejarah Bangsa Indonesia Hukum Islam menjadi satu sumber hukum yang menjiwai Hukum Nasional. Selanjutnya, permasalahan ini dikaji dengan metode penelitian normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah. Di dalam Bab II penulis menyajikan tiga landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat. Tiga teori tersebut mengenai dasar hukum berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Legalisasi Hukum Islam Dalam Perundang-undangan di Indonesia, serta Hukum Islam dan Pembinaan Sistem Hukum di Indonesia. Berikutnya, dalam pembahasan objek penelitian penulis menyajikan data terkait sejarah dan dinamika Hukum Islam di Indonesia sejak zaman Pra-Kolonial hingga Era Reformasi guna mendapatkan analisis yang jernih di dalam pembahasan di Bab IV. Di Bab IV penulis menganalisis data-data yang tersaji di Bab III dengan tinjauan filosofis dan praktis, hingga sampailah pada penarikan kesimpulan dan rekomendasi di Bab V.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum yang dianut oleh sebuah Negara, pastilah mengikuti bentuk pemerintahan yang diadopsinya. Indonesia sebagai negara yang merdeka dari penjajahan Belanda, sedikitnya mengadopsi tiga sumber hukum yang diakui: yakni hukum adat, hukum Belanda atau Barat, dan juga hukum Islam. Tiga sumber hukum tersebut menjadi inspirasi penggalan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mewujud dalam berbagai produk hukum, tak terkecuali UUD 1945.

Sistem hukum di Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik ke dalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Slogan-slogan *Ubi Sociates Ibi Ius, Fiat Justitia Ruat Coelum* dan lainnya menegaskan bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *Qonditio Sine Quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut.

Berdasarkan pendapat Ludwig von Bertalanffy, H. Thieery, William A. Shorde Vouch Jr., sebagaimana yang dikutip oleh Bachsan Mustofa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya

untuk mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum.²⁶

Sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.²⁷ Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi), yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi.

Beranjak dari rumusan ini, maka sistem hukum nasional itu selalu harus dikaitkan pula landasan *Grondnorm* yaitu Pancasila, UU D 1945, dan asas-asas hukum umum. Dijadikannya UUD 1945 sebagai dasar hukum menggariskan bahwa Indonesia tidak menjadi negara sekuler seperti negara Barat dan Negara komunis. Indonesia tidak menjadi negara agama atau negara Islam seperti beberapa negara di Timur Tengah. Sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia menganut negara agama terbuka atau negara dengan kebebasan beragama. Dalam model seperti ini, negara hukum Islam tidak boleh menjadi sistem hukum yang absolut bagi segala lembaga

²⁶ Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), 5-6.

²⁷ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 2.

pemerintahan atau seluruh Indonesia, namun hanya mempunyai kedudukan sebagaimana ditetapkan pada masa Belanda.²⁸

1. Hukum Adat

Indonesia merupakan negara besar, baik ditinjau dari jumlah penduduk maupun luas wilayahnya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tinggal di dalamnya. Tidaklah mengherankan bila sejak dahulu Indonesia menjadi negara yang disinggahi oleh para pedagang seluruh dunia. Para pedagang ini tidak hanya membawa komoditas dan barang dagangan saja, tetapi juga kebiasaan, kepercayaan atau agama dan bahkan sistem hukum. Berdasarkan latar belakang sejarah Indonesia kita dapat mengetahui tiga sistem hukum yang hidup di Indonesia, yakni hukum adat, Islam, dan Barat.²⁹

Hukum adat menurut Vollenhoven sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu Sasongko adalah hukum rakyat pribumi bangsa Indonesia yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan Belanda lainnya. Hukum adat bercorak pluralistik karena bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing.³⁰

Dalam bukunya Vollenhoven memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru

²⁸ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 17.

²⁹ Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), 116.

³⁰ *Ibid*, 117.

mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah *C. Van Vollenhoven* mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.³¹

Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan (*customary law*). Adapun ciri-ciri dari hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Tidak dibedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan.
2. Tidak dibedakan anantara kebendaan bergerak dan tidak bergerak.
3. Tidak dibedakan antara hukum publik dan hukum perdata.
4. Tidak tertulis.
5. Tidak terkodifikasi.³²

Oleh Pemerintah Kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropah melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan ”hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda

³¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 64.

³² Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), 118.

terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia.

Dengan diakuinya hukum adat sebagai hukum positif maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropah dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara penundukan diri kepadanya diberlakukan hukum Eropah (Pasal 131 ayat (2) IS) dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS).³³

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. UUD 1945 sebagai konstitusi mengakui di samping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis. UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis yaitu undang-undang dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.³⁴

Kenyataan ini harus disikapi oleh lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang atau qanun di Aceh harus mampu dan wajib

³³ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Recthvinding*, Volume 8, Nomor 1, April 2019.

³⁴ Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional", *Jurnal Perspektif*, Vol. X No. 3 Edisi Juli (2005).

mengakomodir hukum adat yang berlaku karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Peranan hakim sebagai penemuan hukum sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa, dengan demikian yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁵

Hukum adat diakui dalam konstitusi UUD 1945. Dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Perubahan Kedua ditentukan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, hukum adat diberlakukan menurut undang-undang. Misalnya, dalam pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN RI Tahun 1960 No. 104, TLN RI No. 2043) ditentukan dengan tegas bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Kemudian, dalam pasal 63 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 2009 No. 140 , TLN RI No. 5059) diatur tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menetapkan

³⁵ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *Jurnal KANUN*, No. 50 Edisi April 2010

kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat. Ketentuan-ketentuan ini merupakan bukti bahwa hukum adat secara normatif diakui dan dihormati keberlakuannya di Indonesia. Meski demikian, masih perlu dilakukan pengkajian atau studi empirik yang mendalam tentang efektivitas dan optimalisasi implementasi hukum Adat.

Di dalam masa tahun 1960–1965 Pemerintah menunjukkan suatu sikap yang riil dan lebih mantap untuk memajukan Hukum Nasional yang unsur utamanya didasarkan kepada Hukum Adat dan Hukum Islam, terbukti dari Putusan-putusan MPRS 1960 / II yaitu dalam lampiran pada paragraf 402 No. 34 dan 35 disebut dengan jelas asas-asas yang harus diperhatikan oleh para Pembina Hukum Nasional yaitu:

1. Pembangunan Hukum Nasional harus diarahkan kepada Homogeniteit hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
2. Harus sesuai dengan Haluan Negara dan Berlandaskan Hukum Adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.³⁶

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan dengan Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1958 diberi tugas : melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai yang dikehendaki oleh Ketetapan MPRS

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizan, 2016), 44.

No. II / 1960 (berlandaskan Hukum Adat) dengan tujuan mencapai tata hukum nasional sebagai berikut :

1. Mempersiapkan penyusunan perundang yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara, rakyat serta dengan cita-cita hukum dan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945.
2. Mengusahakan terjemahan kitab yang penting dalam lapangan hukum ke dalam Bahasa Indonesia.
3. Menyelenggarakan peristilahan nasional dalam lapangan perundang-undangan.³⁷

2. Hukum Barat

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law*. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, hal tersebut dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda. Sistem *Civil Law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem *Civil Law*, hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Dokrins Res Ajudicata*).³⁸

³⁷ *Ibid.*, 46.

³⁸ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68-69.

Pembicaraan mengenai “tata hukum Indonesia” akan berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang pernah berlaku dan tetap menjadi hukum, dan aturan yang berlaku sebagai hukum positif. Untuk mengerti dan memahami kedua turan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat kembali sejarah dengan sumber-sumber tata hukumnya. Karena itu sebagai mana diuraikan di atas mazhab-mazhab hukum dalam perkembangannya terdapat dua mazhab yaitu Mazhab Anglo-saxon dan *Eropa Kontinental*, walaupun dalam prakteknya terdapat beberapa sistem hukum dalam suatu negara yang tidak bermazhab akan tetapi mengembangkan hukum sendiri sesuai dengan kearifan-kearifan lokal di negaranya.³⁹

Mazhab Hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang berada di benua Eropa daratan setelah runtuhnya kekaisaran Romawi yang diikuti dengan berkembangnya rasionalisas (otonomi logika) masyarakat Eropa pada saat itu, yang didasarkan atas hukum Romawi yang disebut dengan *Civil Law*. Kenapa disebut *Civil Law*, karena pada mulanya Hukum Romawi pada mulanya bersumber pada sebuah karya agung Kaisar Iustinianus yaitu: *Corpus Iuris Civilis*.⁴⁰

Suatu perbandingan antara dua kecenderungan dalam pemikiran hukum, metode dan praktek yang dengan cara yang sangat umum dilukiskan sebagai ilmu hukum *Anglo-Saxon* dan *Eropa Kontinental* jelas sangat

³⁹ Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori dan Perkembangan Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019). 56.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 223.

penting. Teori hukum tidak dapat mencapai tujuannya yang pokok, bayangannya sendiri, tanpa timbul di luar batas-batas yang berat sebelah dari pendidikan hukum : jika praktisi menghadapi pertentangan dalam Undang-Undang, ia harus harus membandingkan pengertian mengenai hukum dan lembaga-lembaga hukum dari bangsa-bangsa yang berbeda; suatu sistem hukum internasional yang dapat dipakai, harus menggabungkan metode-metode dan pandangan sistem-sistem hukum nasional yang berbeda.

Namun demikian warisan hukum Romawi tetap dipertahankan pada abad ke-15 dengan dikumpulkannya hukum-hukum Romawi ke dalam suatu kodifikasi hukum yang disebut dengan *corpus juris civilis* atau *codex justianus romawi* yang disebut juga dengan *roman civil code*. Dilanjutkan pada abad ke 18 (1805) pada saat terjadi Revolusi Perancis dengan dibentuk suatu kodifikasi hukum yang disebut dengan *code civil des francais/civil code napoleon* dan *B.W (burgelijk wetboek)* . Penerapan sistem hukum tersebut di Perancis dianggap berhasil di Eropa dan pada akhirnya diikuti oleh beberapa negara di Eropa daratan diantaranya Jerman dan Belanda. Yang pada akhirnya pada saat Belanda menjajah Indonesia sistem hukum tersebut dibawa dan diterapkan di Indonesia.⁴¹

Dalam sistem hukum yang disebut mazhab continental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti

⁴¹ C.S.T. Kansil, Et.Al. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), 78.

hukum sebagai keadilan. Hukum ialah *ius* atau *recht*. Bila suatu hukum yang konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu sudah tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum bila adil. Dengan kata teknis : adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.⁴²

Hukum Romawi yang merupakan sumber dari sistem *civil law* telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Semua itu bermula dari penemuan *Corpus Iuris Civilis*. Kodifikasi itu merupakan puncak pemikiran hukum Romawi yang sudah ratusan tahun. Sebenarnya kodifikasi tersebut merupakan suatu kompilasi kasus-kasus yang diselesaikan di Romawi bagian barat. *Corpus Iuris Civilis* tidak diundangkan di kekaisaran Romawi Barat. Orang-orang Romawi dengan kejeniusannya dalam membangun institusi dan akal sehatnya yang praktis dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atas masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepada mereka. Penyelesaian itu diselesaikan dengan merujuk kepada hukum yang diberlakukan oleh kekaisaran itu. Hukum tersebut merupakan pencerminan perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju secara ekonomi dan budaya.⁴³ Ciri-ciri secara umum mazhab hukum Eropa Kontinental :

⁴² Huijbers, *Filsafat Hukum*. (Jogjakarta: Pustaka Kanisius, 1995), 71.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 154.

- a. Hukum secara khusus senantiasa dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mengatur ketertiban umum dan masyarakat. Di luar itu tidak lagi hukum yang dapat dijadikan hukum.
- b. Hukum secara khusus selalu tersusun dalam satu buku undang-undang (kodifikasi) untuk menjamin adanya kepastian hukum.
- c. Para aparaturnya dimulai proses penyelidikan ataupun penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), peradilan (hakim) termasuk pembelaan (advokat) adalah corong dari undang-undang dalam rangka menciptakan keadilan hukum (*ligel justice*).

Krisis dan perjuangan dunia saat ini memaksa kita mengambil cadangan atas bantuan atau kekaburan di mana sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dapat menciptakan kerjasama internasional. Sebaliknya hubungan budaya, ekonomi, militer dan politik yang lebih erat diantara demokrasi-demokrasi barat menciptakan pengertian timbale balik yang lebih baik dari lembaga hukum dan pola-pola berfikir merupakan suatu persoalan akan arti penting praktis.⁴⁴

Secara filosofis, sumber hukum nasional bersumber dari tiga hukum yang eksis di Indonesia: hukum Adat, hukum Barat, dan hukum Islam yang juga dijadikan sebagai sumber hukum. Di dalam *Indische Staatsrgelling* jelas mengatakan bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum yang berlaku disamping hukum adat dan hukum Barat. Setelah proklamasi

⁴⁴ W. Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum. Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 161.

kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hukum nasional tetap dibangun atas tiga sumber hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum nasional dalam bentuk hukum positif terdiri atas hukum Islam, adat, dan Barat. Hanya saja prinsip pembentukannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁵

B. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, hal ini menjadi titik tolak dari berbagai pembentukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat di Indonesia. Segala macam aturan yang dibentuk dan ditetapkan tentunya objeknya adalah masyarakat sebagai warga negara. Karena hukum adalah segala aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap warga negara, dan yang melanggarnya mendapatkan hukuman atau sanksi. Menurut Tap MPR Nomor III/MPR/2000 sumber dasar nasional adalah Pancasila, sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dasar tertulis negara Republik Indonesia dan memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-undang 1945 semula yang dianggap keramat sejak 19 Oktober 1999 telah empat kali mengalami amandemen.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁴⁵ Sirajuddin M., *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008). 145.

- c. Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan dengan syarat diajukan kepada DPR.
- e. Keputusan presiden yang bersifat mengatur dan dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi pemerintahan.
- f. Peraturan daerah yang menampung kondisi khusus daerahnya yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur, bupati dan DPRD kabupaten/kota,
- g. Peraturan desa yang tata cara pembentukannya diatur dalam peraturan masing-masing.⁴⁶

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁴⁶ Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 85-86.

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.⁴⁷ Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau konstitusi, Kelsen menyatakan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu merupakan landasan bagi sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar merupakan *fundamental law*. Untuk itu Hans Kelsen menunjuk hak menguji sebagai mekanisme “*guarantees of the constitution*”.⁴⁸

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.⁴⁹

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110.

⁴⁸ Ni'matul Huda, “Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 15 Januari 2008: 101– 120.

⁴⁹ Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 25.

Dalam teori perundang-undangan terdapat beberapa asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, misalnya: *asas lex specialis derogat legi generali*, *asas lex superior derogat legi inferiori*, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu *asas lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama.⁵⁰

Kebermaknaan pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan sangat terkait dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada saat diekeluarkannya Tap MPRS No. XX/1996 tujuannya untuk melakukan penertiban peraturan perundang-undangan di masa Orde Lama. Penertiban ini perlu dilakukan karena pada tahun itu ada kekacauan peraturan perundang-undangan baik mengenai kewenangan, macam, isi maupun tata cara pembuatannya. Sangat banyak peraturan yang bersumber pada asas kebebasan bertindak sehingga mengacaukan tertib peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi adanya penertiban peraturan perundang-undangan melalui hirarki adalah, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Selanjutnya, isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi tingkatannya. Dikecualikan dalam hal ini apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh UU ditetapkan

⁵⁰ Erna Tri Rusmala, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, 2008), 94.

menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang tingkatannya rendah.⁵¹

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain : Pertama, Soal Ketetapan MPR/ MPRS, karena Ketetapan MPR/ MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, Soal Perpu, karena kedudukannya dibawah Undang- Undang, menurut TAP MPR No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-Undang dalam UU No. 10 Tahun 2004.⁵²

Ketiga, Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis. keempat, Kata “dan lain-lain” yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Kelima, Soal “Instruksi” yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat. Dan kelima, Menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundangundangan adalah suatu hal yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan landasan filosofis dari Negara yang memuat aturan-aturan pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari

⁵¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 57.

⁵² Hasanuddin Hasim, “Hierarki Peraturan Perundang-Undangn Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem”, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 1, No. 2 Desember 2017.

Undang-Undang ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.

C. Pembinaan Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional, yang dalam praktik sarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Perubahan politik, memasuki era reformasi akan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Memasuki era reformasi arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, yang merupakan produk era reformasi. Dalam arah kebijakan GBHN disebutkan, Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.⁵³

Dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran serta pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu diadakan kodifikasi hukum nasional. Yang dimaksud dengan kodifikasi adalah penyusunan kaidah-kaidah hukum sejenis dalam kitab-kitab hukum yang disusun secara sistematis. Yang diartikan dengan hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia tanpa memandang golongan, keturunan, suku bangsa dan agama yang dianutnya.

⁵³ Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), 174.

Demi mewujudkan pembangunan hukum yang tararah, pemerintah membentuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Instansi pemerintah yang bertugas melakukan Pembinaan Sistem Hukum Nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. BPHN merupakan kelanjutan dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). LPHN berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tugas LPHN adalah membantu pemerintah secara giat dan penuh daya cipta dalam lapangan hukum dengan tujuan mencapai suatu tatanan hukum nasional.⁵⁴

Pemikiran mengenai perencanaan peraturan Perundang-undangan dan kaitannya dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah dimulai dalam sejak tahun 1976 dalam simposium mengenai pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Simposium itu dimaksudkan untuk:

1. menetapkan cara-cara pembinaan hukum Nasional
2. menunjang pembuatan pola umum perencanaan hukum dan Perundang-undangan,

⁵⁴ Dirjend Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 1, Program Legislasi Nasional, 2005, Jakarta.

3. memperoleh sistem pemikiran perencanaan hukum mencegah kesimpang siuran dalam pembiayaan dan penanganan materinya⁵⁵

Secara umum nilai-nilai dasar cita-cita hukum bangsa Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum nasional dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rasional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
2. Hukum nasional dibangun atas prinsip penghormatan' harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan ' hak asasi warga negara dan hak-hak sosial secara-. selaras, serasi dan seimbang. Hukum nasional harus mampu mencegah timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat. Disimpulkan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan pbkok pikiran kedua dan keempat UUD 1945.
3. Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia. Seluruh tumpah darah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di mana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. "Disimpulkan dari sila Persatuan Indonesia dan pokok pikiran kesatu Pembukaan UUD 1945.
4. Hukum nasional dibentuk sesuai dengan prinsip negara yang berkedaulatan rakyat, artinya dengan persetujuan rakyat melalui

⁵⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional (Memberdayakat Pusat Dokumentasi BPHN Sebagai Informasi Hukum Nasional, Vol. 2. No. 1, Jakarta, 2001, hlm, 10

permusyawaratan perwakilan, agar hukum nasional sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran, tanggung jawab dan menggairahkan peran serta dalam pembangunan dan menumbuhkan dinamika kehidupan bangsa dalam suasana tertib dan teratur. Disimpulkan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945.

5. Hukum nasional menetengahkan nilai keadilan sosial dalam arti hukum nasional membuka jalan bagi terwujudnya pemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimpulkan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 1945.⁵⁶

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan nasional yang hendak dicapai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah terwujudnya pengelolaan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara yaitu lembaga tinggi negara bersama-sama dengan segenap rakyat di seluruh wilayah NKRI.

⁵⁶ Riri Nazriyah, "Peranah Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*. No. 20 Vol. 9. Juni 2002, 136 – 151.

Tujuan nasional ini dapat dicapai apabila didukung oleh adanya kebijakan pembangunan yang tepat, efektif, dan efisien. Terdapat beberapa pemaknaan terhadap suatu kebijakan seperti dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan Harold Laswell sebagaimana dikutip oleh Edi Wibowo bahwa menurut Thomas R. Dye “kebijakan publik diartikan sebagai segala yang dilakukan oleh pemerintah, sebab-sebab mengapa hal tersebut dilakukan, dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya”.dan menurut Harold Laswell “kebijakan diartikan sebagai serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dan praktik.”⁵⁷

Setelah UU No. 25 Tahun 2004 diundangkan, mekanisme pembangunan nasional mengalami perubahan, yang sebelumnya diatur dan dituangkan dalam GBHN menjadi tidak diatur dan dituangkan dalam GBHN lagi. Dalam UU No 25 Tahun 2004 ini setidaknya terdapat 5 (lima) pendekatan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Politik.
2. Teknokratik.
3. Partisipatif.
4. Atas-bawah (*Top-Down*).
5. Bawah-Atas (*Bottom-Up*).

Untuk melihat proses pembangunan hukum nasional dalam upaya mencapai tujuan nasional dapat dilihat dari pendekatan sistem hukum (*legal system approach*). Dilihat dari sisi historisnya dengan pemberlakuan asas

⁵⁷ Edi Wibowo, *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), 45.

konkrodasi oleh negara kolonial, sistem hukum di Indonesia lebih didominasi oleh sistem Eropa continental (*Civil Law System*). Namun tidak berarti Indonesia tidak memperoleh pengaruh dari sistem hukum yang lain. Hukum di Indonesia tetap dipengaruhi oleh sistem yang lain yang ada di belahan bumi ini seperti *common law system*, *anglo saxon*, *Islamic law system*. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada satu sistem hukum pun di dunia ini yang benar-benar steril dari pengaruh sistem hukum lainnya. Dengan kata lain, sistem hukum yang berlaku di suatu negara tetap memperoleh pengaruhnya dari sistem hukum yang lain, tergantung pada seberapa derajat pengaruhnya dan itulah yang membedakannya.⁵⁸

Pembangunan hukum pada hakekatnya adalah untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan hukum minimal tidak bisa lepas dari pengambil kebijakan sebagai pemegang kepentingan politik, karena pada dasarnya produk hukum adalah hasil dari konfigurasi politik. Di masa sebelum lahirnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kepentingan politik saat itu “keliru” dalam menempatkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hukum dijadikan sebagai instrumen legitimasi kepentingan pengambil kebijakan semata.

⁵⁸ Satijpto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: UMS, 2002), 81.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2002.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinpera Islam. 2004.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembanganya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
- Ahmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kencana. 2020.
- Ahmad Sukarja, *Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia?*, Bandung: Ulul Albab Press. 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Di Indonesia dari Masa ke Masa, *Jurnal Unisia*, No. 16 Tahun Triwulan V/1992.
- Ajub Ishak, "Pembentukan Hukum dan Tingkah Laku Sosial," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No 1, Juni 2010.
- Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif. 1976.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Amir Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2004.
- Amiruddin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Amiek Soemarmi dkk, "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
- Arskal Salim, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Jakarta: Harmoni. 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Majalah Hukum Nasional (Memberdayakat Pusat Dokumentasi BPHN Sebagai Informasi Hukum Nasional*, Vol. 2. No. 1, Jakarta, 2001.

- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya. 2003.
- Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramida. 1998.
- Burhanuddin, *Syari'at Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: The Asia Fondation. 2003.
- Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- C.S.T. Kansil, Et.Al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni. 2005.
- Dirjend Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 1, Program Legislasi Nasional, 2005, Jakarta.
- Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metodologi Penelitian, cet. I*, Jakarta : UI Press. 1993.
- Edi Wibowo, *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, Yogyakarta: YPAPI. 2004.
- Erna Tri Rusmala, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram. 2008.
- Faisal, *Pluralisme Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Maghza. 2013.
- Farida Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 1, No. 2 Desember 2017.
- Huijbers, *Filsafat Hukum*, Jogjakarta: Pustaka Kanisius. 1995.
- Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya. 1991.
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Ismail Sunny, *Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum Islam*", Jakarta: Logos Publishing. 1998.

- Iqbal Muhamad, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Group. 2014.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas. 1995.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru. 1976.
- Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum" *Jurnal Kanun*, 2010, No. 50.
- Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan. 2005.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum islam di Indonesia* Yogyakarta: LKis. 2001.
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah. 1984.
- Mudzakir, "Legislasi Hukum Islam Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11, Juni 2011.
- M. Syafi'i Anwar, *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi*, Bandung: Mizan. 1995.
- M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: "Abstraksi Hukum Islam"*, Jakarta: Logos. 1999.
- Mudzakir, "Legislasi Hukum Islam Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11, Juni 2011.
- Masykuri Abdillah, dkk, 2005, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan. 2005.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001, *Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum islam di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis. 2001.
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Sistem Hukum Nasional" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2008, No. 2.

- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press. 2001.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad Aiz, "Format Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Kordinat*, 2018, Vol. XVII No.1.
- Mochtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES. 2003.
- Nimatul Huda, "Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 15 Januari 2008: 101– 120.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2001.
- Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* Yogyakarta : Gama Media. 2002.
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional", *Jurnal Perspektif*, Vol. X No. 3 Edisi Juli (2005).
- Riri Nazriyah, "Peranah Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*. No. 20 Vol. 9. Juni 2002, 136 – 151.
- Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islami*, Jakarta: Bina Aksara. 1997.
- Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni. 1996.
- Satijpto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: UMS. 2002.

- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizan. 2016.
- Sirajuddin M., *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bengkulu: Pustaka Pelajar. 2008.
- Sopyan Mei Utama, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2018, Vol. 2, No. 1.
- Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Andi Offset. 1995.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Supomo Dan Djoko Sutowo, *sejarah politik hukum adat*, Jakarta: Djambatan. 1955.
- Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitan Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Laksana. 1989.
- Tersedia On-Line <https://www.kamusbesar.com/kedudukan> Diakses Pada Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum. Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995.
- Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2013.
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Bayu Media. 2005.
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: UGM Perss. 1989.
- Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019, *Teori dan Perkembangan Hukum*, (Tangerang: Unpam Press. 2019.

Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia” *Jurnal Recthvinding*, Volume 8, Nomor 1, April 2019.

